

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan secara sistematis dan terintegrasi sebagai kesesuaian perencanaan pembangunan antar waktu maupun antar level pemerintahan. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Mojokerto telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto tahun 2005-2025. Setiap tahun pemerintah daerah harus menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh OPD pada tahun yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh pada dasarnya tetap mengacu pada APBD tahun 2018 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2018.

Perkembangan kondisi pada tahun 2018 menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018. Perubahan RKPD sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Mojokerto. Perubahan RKPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Pasal 285 disebutkan bahwa (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kegiatan review ini menggunakan

dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah;
- Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan RKPD Tahun 2018 memuat evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD. Evaluasi hasil RKPD memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2018. Sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD, memuat pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan atau penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA (KUPA) dan perubahan PPAS (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 dilandasi oleh:

1. Landasan idil: Pancasila;
2. Landasan konstitusional: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
 - a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
 - m. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
 - n. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
 - o. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 adalah untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan utama dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kota Mojokerto dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan.

- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi profil kerangka ekonomi baik makro maupun mikro dan keuangan daerah Kota Mojokerto sampai pada triwulan II.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini tentang perubahan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016, baik berupa pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan atau penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini tentang perubahan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016, baik berupa pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan atau penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 EVALUASI PEREKONOMIAN

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2018 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2018 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2018.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- (a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- (b) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- (c) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2017 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018, dan/atau;
- (d) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur bulan Juli tahun 2016, kondisi perekonomian Kota Mojokerto hingga akhir tahun 2015 mencapai 6,01 persen meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,7 persen. Kondisi ini berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang hanya mencapai 5,44 persen dan kondisi ekonomi nasional yang berada pada posisi 4,8 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami penurunan. Kota Mojokerto merupakan salah satu dari 4 Kabupaten (Bojonegoro, Magetan, dan Sampang) yang pertumbuhan ekonominya meningkat. Kondisi perekonomian nasional telah menekan perekonomian di Jawa Timur.

Namun demikian kinerja ekonomi Kota Mojokerto tetap bertahan dan bahkan meningkat. Berbagai kebijakan pemerintah melalui stimulasi infrastruktur serta berbagai even yang digelar, diakui telah berdampak cukup signifikan pada perekonomian. Hal ini kedepan tetap dipertahankan untuk menciptakan fundamental ekonomi yang lebih kokoh guna pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan (higher and sustainable growth) di masa depan. Untuk itu dengan berbagai upaya, diproyeksikan hingga akhir 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto berada dalam kisaran 6,20 persen, yang distimulasi melalui berbagai program peningkatan dan penguatan kualitas belanja daerah serta realokasi anggaran yang kurang produktif menjadi lebih produktif.

Dalam struktur ekonomi Mojokerto, nampak pertumbuhan setiap sektor yang mengalami perkembangan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Mojokerto terutama ditopang dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang diproyeksi tumbuh sebesar 9,98 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 8,09 persen, serta Industri Pengolahan yang tumbuh mencapai 7,41 persen. Ketiga sektor ini merupakan sektor yang tumbuh dari berkembangnya pariwisata di Kota Mojokerto. Di samping itu berbagai upaya stimulasi ekonomi diharapkan mendorong peningkatan sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 8,26 persen serta Real Estate sebesar 9,45 persen.

Tabel 2. 1: Pertumbuhan PDRB (ADHK) Kota Mojokerto 2012-2016

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	26.863,5	27.369,1	30.405,2	33.356,3	36.000,1
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	24.468,1	25.004,3	27.754,5	30.382,1	32.694,1
	a. Tanaman Pangan /Food Crops	16.484,5	17.091,9	19.257,6	21.296,5	23.259,2
	b. Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	905,1	950,6	1.045,3	1.132,5	1.207,5
	c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	478,1	548,7	547,7	544,2	563,4
	d. Peternakan/Livestock	6.270,9	6.077,4	6.554,8	7.030,5	7.264,7
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	329,4	335,7	349,3	378,4	399,3
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
3	Perikanan/Fishery	2.395,4	2.364,8	2.650,7	2.974,2	3.306,0
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,0	0,0	0,0	0,0	0
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3	Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	0,0	0,0	0,0	0,0	0
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	407.971,5	444.758,4	493.475,9	549.629,5	603.427,3
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2	Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Products and Beverages	104.598,3	112.182,6	122.935,3	139.661,0	153.495,7
3	Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Products	98.224,7	106.461,1	116.203,9	129.193,4	141.329,5

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel	6.419,7	7.028,2	7.662,4	8.244,5	8.971,2
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Manufacture of Leather and Related Products and Footwear	158.065,8	176.331,1	200.770,1	223.612,6	247.777,5
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials	9.408,7	10.194,6	11.092,7	11.520,6	12.209,2
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	13.760,0	14.185,0	14.810,5	16.101,9	16.883,2
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical	1.341,3	1.482,2	1.592,8	1.705,7	1.869,7

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
	Products					
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	1.332,5	1.371,4	1.450,3	1.534,3	1.625,2
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	1.020,2	1.089,4	1.163,4	1.245,8	1.336,4
11	Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment	652,5	714,2	779,7	845,5	930,4
13	Industri Mesin dan Perlengkapan /Manufacture of Machinery and Equipment	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14	Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	4.619,5	4.992,5	5.474,9	5.979,9	6.498,0
1	Industri	8.528,3	8.726,1	9.539,9	9.984,4	10.501,2

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
6	Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment					
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	3.059,0	2.915,2	2.958,6	3.243,3	3.330,6
1	Ketenagalistrikan/ Electricity	3.059,0	2.915,2	2.958,6	3.243,3	3.330,6
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es/Manufacture of Gas and Production of Ice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5.365,0	5.341,1	5.420,0	5.607,2	5.723,2
F	Konstruksi/Construction	416.139,2	447.848,4	498.294,2	541.560,9	592.820,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.075.500,8	1.198.910,9	1.305.946,5	1.431.175,3	1.583.769,2
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya / Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor	307.514,2	350.613,8	380.283,5	407.484,0	449.905,1

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
	Vehicles and Motorcycles					
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles	767.986,6	848.297,1	925.663,1	1.023.691,3	1.133.864,2
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	94.819,3	104.338,2	115.640,4	127.521,9	139.153,0
1	Angkutan Rel/Railways Transport	4.668,9	5.380,1	6.373,9	7.730,3	9.143,6
2	Angkutan Darat/Land Transport	58.068,9	63.950,5	70.582,4	77.083,8	83.619,7
3	Angkutan Laut/Sea Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/River, Lake, and Ferry Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Angkutan Udara/Air Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier	32.081,6	35.007,7	38.684,0	42.707,8	46.389,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	231.981,4	253.413,3	287.412,5	322.941,4	361.300,4
1	Penyediaan Akomodasi/Accommodation	2.922,1	3.364,5	3.850,2	4.309,4	4.843,7

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016**
	modation					
2	Penyediaan Makan Minum/Food and Beverage Service Activities	229.059,3	250.048,9	283.562,3	318.632,0	356.456,6
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	461.680,4	500.057,9	541.917,6	587.698,4	638.265,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	279.051,9	318.695,8	357.948,4	403.275,7	459.184,8
1	Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services	168.968,7	194.519,4	217.049,1	247.171,8	283.702,9
2	Asuransi dan Dana Pensiun/Insurance and Pension Fund	44.322,9	49.969,0	56.919,7	63.887,2	71.927,3
3	Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services	65.677,8	74.112,5	83.873,1	92.099,9	103.423,0
4	Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	82,5	94,9	106,5	116,9	131,6
L	Real Estat/Real Estate Activities	107.133,8	119.925,8	126.341,7	140.016,3	153.233,3
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	27.650,2	31.355,5	34.439,7	38.193,5	42.350,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	188.877,0	201.924,6	206.186,2	233.319,5	252.404,7
P	Jasa Pendidikan/Education	161.349,1	183.611,3	202.236,4	226.443,7	251.758,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	40.842,6	46.131,0	51.391,0	56.174,6	62.829,7

Lapangan Usaha	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016**
Sosial/Human Health and Social Work Activities					
R,S, T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	135.569,2	149.537,3	166.797,7	180.913,5	196.645,0
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	3.663.853,8	4.036.134,1	4.426.812,2	4.881.070,9	5.382.195,2

**Proyeksi Sementara

Sumber : RKPD Kota Mojokerto 2018

Perkembangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan, Industri Pengolahan, serta Real Estate, sudah dapat diprediksi, mengingat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong pergerakan ekonomi antara lain melalui : Program Mojokerto Mall yang secara resmi telah diluncurkan Menteri BUMN untuk memacu Pemasaran UMKM Mojokerto secara digital, Program Smart Kampung Mojokerto untuk menggerakkan ekonomi lokal perdesaan, pelibatan BUMN dalam pengentasan kemiskinan di Mojokerto, Peningkatan peran serta pengusaha dalam membina usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Program pelepasan kredit oleh perbankan untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KKPE, KUPS dan Kredit Resi Gudang.

Tabel 2. 2: Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2012-2016 (%)

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i> (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016** (6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture</i>	1,70	(4,83)	4,64	3,00	3,75
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,47	4,75	6,01	6,06	6,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	10,79	0,93	1,03	1,73	3,42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Wate Management and Remediation Activities</i>	3,60	(2,32)	(0,20)	2,47	2,47
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,52	6,12	6,02	3,55	4,12
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,26	6,55	5,72	5,81	6,09
8	Transportasi &	3,22	3,19	3,89	5,30	5,30

Lapangan Usaha/Industry (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016** (6)
Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>					
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accomodation and Food Service Activities</i>	5,94	4,41	6,26	6,28	6,28
10 Informasi & Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,47	7,89	7,87	7,53	7,53
11 Jasa Keuangan & Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,24	9,02	6,27	5,97	5,97
12 Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,74	6,69	4,72	4,29	4,29
13 Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,78	5,46	7,09	5,56	5,56
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security Activities</i>	3,73	2,38	0,90	5,76	5,50
15 Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,35	7,99	5,09	6,42	6,42
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	11,25	8,19	8,32	3,09	5,60
17 Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,97	6,31	5,53	4,99	4,99
PDRB	6,09	6,20	5,83	5,74	5,77

**Proyeksi Sementara

Sumber : RKPD Kota Mojokerto 2018

Selama tahun 2015, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 5,90 persen (harga konstan tahun 2010). Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen dan inflasi Kota Mojokerto sebesar 2,55 persen, hal ini akan menjadi titik terang dan harapan untuk semakin lebih membaiknya perekonomian Kota Mojokerto di masa-masa mendatang.

Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong peningkatan arus perdagangan lokal, regional dan antar pulau turut serta memberikan kontribusi pada sektor ini. Upaya pemerintah melalui kemudahan proses perijinan dan promosi pariwisata Kota Mojokerto juga meningkatkan sektor ini.

2.1.2 LAJU INFLASI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dari pengertian dimaksud maka inflasi merupakan proses dari suatu

peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh- mempengaruhi.

Laju inflasi bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian, oleh karena sangat berpengaruh dari seberapa besar masyarakat yang terimbas menderita dari kenaikan inflasi. Semakin besar jumlah masyarakat (miskin) yang terimbas maka akan semakin parah perekonomian suatu wilayah tersebut.

Di tingkat nasional, laju inflasi mencapai 3,35 persen. Relatif rendah dan stabilnya inflasi tersebut didukung oleh terjaganya komponen Harga Diatur Pemerintah (Administered Prices) dan inflasi komponen Bergejolak pada level yang terkendali. Pelemahan kondisi perekonomian global turut mendukung rendahnya laju inflasi pada tahun 2015 berada pada level

3,95 persen (yoy), lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 4,93 persen (yoy). Selain itu, penyesuaian harga BBM, tarif listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyebabkan laju inflasi komponen ini terkendali pada 0,39 persen (yoy), serta terkendalinya inflasi komponen Bergejolak didukung oleh ketersediaan komoditas pangan, terutama hortikultura sepanjang tahun. Meskipun terdapat dampak negatif El Nino, namun berkat upaya pemerintah antara lain kebijakan penguatan cadangan beras pemerintah dan program pembangunan infrastruktur, laju inflasi komponen ini dapat ditahan pada posisi 4,84 persen (yoy). Laju inflasi di Kota Mojokerto diperkirakan berada dalam kisaran 3+1 persen dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Proyeksi laju inflasi ini terutama dipengaruhi konstelasi perekonomian dan laju inflasi nasional, serta berbagai upaya untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Laju inflasi di Kota Mojokerto diharapkan dapat terkendali melalui pengendalian harga barang dan jasa sehingga tetap stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya serta peningkatan daya beli masyarakat yang semakin nyata.

2.2 EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN ORGANISASINYA

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kota Mojokerto Saat ini memiliki jumlah total Beanja sebesar yang terbagi menjadi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib-Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan pilihan dan 7 Urusan Penunjang pemerintahan. Sampai dengan Triwulan Ke –II tahun 2018 Kota Mojokerto setidaknya telah menyerap anggaran sebesar 123,314,748,289,00 dari total APBD

Tabel 2. 3: Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Masing-Masing Urusan Kota Mojokerto

ORGANISASI	APBD	REALISASI S/D TW II	% SERAPAN
DINAS PENDIDIKAN		21,607,921,978.00	
DINAS KESEHATAN		20,275,951,919.00	
RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO		1,710,638,909.00	

ORGANISASI	APBD	REALISASI S/D TW II	% SERAPAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		2,435,886,154.00	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		661,353,623.00	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1,499,428,814.00	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		2,860,959,033.00	
DINAS SOSIAL		2,224,184,805.00	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1,909,265,363.00	
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN		1,497,422,862.00	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		4,740,271,125.00	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1,587,307,720.00	
DINAS PERHUBUNGAN		4,108,033,652.00	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1,673,560,615.00	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA		1,342,356,327.00	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1,472,056,103.00	
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1,222,360,381.00	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		1,112,563,817.00	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		2,069,599,177.00	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-		
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-		
SEKRETARIAT DAERAH	-		
SEKRETARIAT DPRD		8,654,301,363.00	
KECAMATAN PRAJURIT KULON		510,646,990.00	
KECAMATAN MAGERSARI		709,774,494.00	
KECAMATAN KRANGGAN		485,927,890.00	
INSPEKTORAT		1,276,453,415.00	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		1,963,434,727.00	
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		6,832,204,311.00	

ORGANISASI	APBD	REALISASI S/D TW II	% SERAPAN
BADAN KEPEGAWAIAN		1,929,897,342.00	
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1,021,317,472.00	

Sumber: Bappeko, 2018

2.2.1 Evaluasi Program Pendidikan

Penyelenggaran urusan Pendidikan di Kota Mojokerto dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dalam urusan Pendidikan sampai dengan triwulan kedua terealissasi sebesar persen. Ringkasan anggaran dan realisasi program dari penyelanggaran urusan Pendidikan sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2018

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		50.830.042,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		16.153.626,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		4.039.267.500,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor		42.500.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		1.732.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor		10.800.168,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.206.500,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		843.600,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2.920.000,00	
Penyediaan bahan logistik kantor		4.591.950,00	
Penyediaan makanan dan minuman		13.418.000,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		114.191.522,00	
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor		27.000.000,00	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		27.240.000,00	
Pengadaan mebeluer sekolah		1.126.300,00	
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		34.476.500,00	
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		198.275.400,00	
Akreditas TK		44.396.100,00	
Pengadaan pakaian seragam sekolah		21.773.950,00	
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		16.340.300.600,00	
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah		47.104.070,00	
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-		42.696.000,00	

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Islam Setara SD dan SMP			
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP		19.553.200,00	
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa		16.213.000,00	
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI/SLB		98.414.900,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP		29.274.600,00	
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal		24.513.000,00	
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal		65.275.550,00	
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal		48.242.900,00	
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi		4.692.000,00	
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		65.465.000,00	
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		6.672.050,00	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		2.219.900,00	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		38.071.350,00	
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan		37.086.400,00	

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Dari seluruh program yang direncanakan sampai dengan triwulan kedua tahun 2018, Program Administrasi Perkantoran memiliki capaian realiasi persen. Dan beberapa program belum terealisasi

2.2.2 Evaluasi Program Urusan Kesehatan

Penyelanggaran urusan Kesehatan di Kota Mojokerto dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dalam urusan Kesehatan sampai dengan triwulan kedua terealisasi sebesar persen. Ringkasan anggaran dan realisasi program dari penyelanggaran urusan Kesehatan sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 5: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2018

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		294.950.664,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		47.106.955,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		15.375.000,00	

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa kebersihan kantor		271.764.300,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		4.180.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor		5.863.800,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		8.402.400,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		456.000,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3.580.000,00	
Penyediaan bahan logistik kantor		6.248.000,00	
Penyediaan makanan dan minuman		525.000,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		22.590.291,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		179.449.600,00	
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor		529.854.400,00	
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		26.479.100,00	
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		7.249.900,00	
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan		59.345.550,00	
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		68.544.650,00	
Penuluhan masyarakat pola hidup sehat		781.359.000,00	
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan		206.510.150,00	
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan		12.400.000,00	
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi		19.500.000,00	
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya		12.679.100,00	
Penuluhan menciptakan lingkungan sehat		222.347.800,00	
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		3.653.000,00	
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		102.474.200,00	
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik		2.605.300,00	

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah		3.422.900,00	
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		39.124.050,00	
Penyusunan standar pelayanan kesehatan		21.214.850,00	
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		44.483.900,00	
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas		37.995.500,00	
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan		154.416.250,00	
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis		11.799.500,00	
Pelayanan pemeliharaan kesehatan		31.023.450,00	
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan		60.705.984,00	
Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan		11.072.100,00	
Pengembangan Kajian/Penelitian Program Kesehatan		10.375.900,00	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		3.224.100,00	
Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta		15.413.235.494,00	
Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan		4.050.650,00	
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan		139.020.850,00	
Peningkatan Kesehatan Masyarakat		10.163.250,00	
Bantuan Operasional Kesehatan		94.701.650,00	
Jaminan Persalinan		13.637.500,00	
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya		1.256.789.881,00	

RSU DR Wahidin Sudiro Husodo

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			

		926.182.098,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		49.612.735,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		40.775.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		4.255.500,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1.005.000,00	
Pendidikan dan pelatihan formal		209.405.436,00	
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		41.212.500,00	
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		102.468.680,00	
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		306.609.960,00	
Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan		29.112.000,00	

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Pada Dinas Kesehatan Angka Serapan paling tinggi terdapat pada program pengawasan obat dan makanan dengan realisasi sebesar % dan beberapa program belum terealisasi. Sementara pada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo serapan terbesar adalah pada program pendisiplinan aparatur dengan prosentase sebesar %

2.2.3 Evaluasi Program Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2. 6: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2018

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		53.350.211,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		34.391.225,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		330.615.000,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor		32.220.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
	13.188.500,00		
Penyediaan alat tulis kantor	10.442.725,00		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.272.785,00		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.033.500,00		
Penyediaan peralatan rumah tangga	3.185.500,00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4.860.000,00		
Penyediaan bahan logistik kantor	6.260.550,00		
Penyediaan makanan dan minuman	4.986.500,00		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	124.638.038,00		
Pembangunan gedung kantor	3.237.500,00		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.885.500,00		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	2.475.000,00		
Pembangunan jalan	66.322.000,00		
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	198.610.310,00		
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	9.375.000,00		
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	48.029.200,00		
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	5.875.000,00		
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	14.243.500,00		
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	147.970.500,00		
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	18.507.700,00		
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	146.393.962,00		
Peningkatan pembersihan dan pengeringan sungai/kali	804.322.448,00		

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Pembangunan/peningkatan infrastruktur		6.325.000,00	
Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perkotaan		311.051.500,00	
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perkotaan		10.187.500,00	
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang		8.630.000,00	

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Pada Dinas Kesehatan Angka Serapan paling tinggi terdapat pada administrasi perkantoran dengan realisasi sebesar % sementara realisasi riil yang paling rendah adalah pada program pembangunan infrastruktur pembangunan yang hanya sebesar %. meskipun ada beberapa program yang tidak terlaksana hingga triwulan II.

2.2.4 Evaluasi Program urusan Perumahan

Tabel 2. 7: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Perumahan Kota Mojokerto Tahun 2018

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		14.248.471,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		25.636.528,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		35.136.100,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor		17.000.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		2.475.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor		5.837.600,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.075.350,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.330.600,00	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		33.518.000,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		2.605.000,00	
Penyediaan bahan logistik kantor		725.500,00	
Penyediaan makanan dan minuman		11.739.100,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		68.710.834,00	

Pengadaan komputer dan kelengkapannya		44.221.100,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		9.980.390,00	
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor		45.000.000,00	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		24.743.050,00	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		587.500,00	
Penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh		11.359.200,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman		17.747.150,00	
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah		117.948.000,00	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah		164.729.150,00	

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel diatas urusan Perumahan dilaksanakan oleh dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi terbesar pada program rutin dan program pengembangan perumahan masih belum berjalan sampai dengan triwulan II 2018

2.2.5 Evaluasi Program Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Tabel 2. 8: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2018

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4.343.495,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		19.783.739,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		36.475.000,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor		38.912.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		7.000.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor		8.596.850,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
	5.891.450,00		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	627.150,00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4.550.000,00		
Penyediaan bahan logistik kantor	1.137.900,00		
Penyediaan makanan dan minuman	4.235.000,00		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.540.000,00		
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	46.100.000,00		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	450.000,00		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00		
Pembinaan Kewilayahannya	278.741.050,00		
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.224.900,00		
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	156.369.050,00		
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	56.169.500,00		
Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	28.168.550,00		
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	83.060.500,00		
Penyuluhan kepada masyarakat	241.457.150,00		
Koordinasi forum-forum diskusi politik	17.976.350,00		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	46.488.180,00		
Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelejen Daerah (Forkominda)	146.299.500,00		
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	108.750.000,00		
Pemantauan Kegiatan Orang Asing	40.081.500,00		

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel tersebut Program diatas adalah program sebagaimana yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana untuk program non rutin serapan terbesar diduduki oleh program pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional dengan serapan sebesar % sementara beberapa kegiatan juga masih mengalami kekosongan

Tabel 2. 9: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2018

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		20.384.708,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		103.703.200,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		45.144.400,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor		26.910.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		2.600.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor		5.831.000,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3.360.000,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		490.000,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		1.620.000,00	
Penyediaan bahan logistik kantor		1.589.000,00	
Penyediaan makanan dan minuman		1.695.000,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		60.846.725,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		113.751.000,00	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		121.200.000,00	
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan		1.300.800.000,00	
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja		414.090.000,00	
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan		57.276.000,00	
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan		330.800.000,00	
Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah		211.818.000,00	
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		37.050.000,00	

Sumber: Bappeko 2018

Pada tabel diatas merupakan urusan kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP juga melaksanakan urusan kesejahteraan sosial dengan adanya program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal sebesar %

2.2.6 Evaluasi Program Urusan Sosial

Tabel 2. 10: APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2017

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		37.345.610,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		24.829.600,00	
Penyediaan jasa administrasi keuangan		93.116.488,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor		17.500.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		6.215.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor		11.784.300,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.309.000,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2.492.700,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		24.050.000,00	
Penyediaan bahan logistik kantor		5.276.000,00	
Penyediaan makanan dan minuman		13.075.000,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		139.868.964,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		115.611.000,00	
Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana daerah		66.338.750,00	
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor		28.455.000,00	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		13.650.000,00	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4.215.500,00	

Program Kegiatan	APBD	Realisasi	% Serapan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		197.470.000,00	
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin		42.074.500,00	
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		135.472.200,00	
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		7.460.000,00	
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		67.408.400,00	
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		159.865.000,00	
Pelayanan Kepada Warga Masyarakat		372.011.513,00	
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma		107.448.500,00	
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo		235.822.130,00	
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial		5.570.250,00	
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat		32.110.300,00	
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		21.002.500,00	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan		94.951.650,00	
Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Tanggap Bencana Alam dan Bencana Sosial		135.384.950,00	

Sumber: Bappeko, 2018

Berdasarkan Tabel diatas merupakan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan prosentase sebesar % sementara realisasi terendah ada pada program peninggatan pembinaan dan pelayanan masalah sosial dengan capaian realisasi anggaran %.